

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata “*instruction*” yang dalam Bahasa Yunani disebut “*instructus*” atau “*intruere*” yang berarti menyampaikan pikiran, dengan demikian arti intruksional adalah menyampaikan pikiran atau ide yang telah diolah secara bermakna melalui pembelajaran.¹ Kegiatan belajar dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar.

Pembelajaran adalah kegiatan dimana guru melakukan peranan-peranan tertentu agar siswa dapat belajar untuk mencapai tujuan Pendidikan yang diharapkan. Strategi pengajaran merupakan keseluruhan metode dan prosedur yang menitikberatkan pada kegiatan peserta didik dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan.² Pembelajaran dalam konteks Pendidikan merupakan aktivitas Pendidikan berupa pemberian bimbingan dan bantuan rohani bagi yang masih memerlukan.

Dalam pengertian lain, pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar peserta didik yang bersifat internal.³

Sedangkan Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur’an dan Al-Hadist melalui kegiatan bimbingan, Pendidikan, latihan, serta penggunaan pengalaman.⁴

Zakiyah Darajat berpendapat bahwa Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan islam sebagai pandangan hidup.⁵

¹ Bambang Warsita, *Tekhnologi Pembelajaran, Landasan, dan Aplikasinya*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 265.

² Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), 201.

³ Muhaimin dkk, *Strategi Belajar Mengajar*, (Surabaya : Citra Media, 1996), 157

⁴ Abdul Majid, *Belajar dan Pembelajaran*, (Bandung : Remaja Rosadakarya, 2012), 270.

⁵ Zakiyah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 87.

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah suatu upaya yang membuat peserta didik dapat belajar, butuh belajar, terdorong belajar, mau belajar, dan tertarik untuk terus menerus mempelajari agama islam yang dimana memiliki fungsi untuk bagaimana cara beragama yang benar, sebagai pengetahuan yang mengakibatkan perubahan tingkah laku seseorang baik dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam sangat penting karena guna membentuk karakter peserta didik yang lebih unggul dalam suatu Pendidikan.

B. Prinsip-Prinsip Pembelajaran PAI

Dalam sebuah usaha sadar yang dilakukan pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai dari sebuah usaha tersebut. Begitu pula dengan pembelajaran PAI, Zakiyah Darajat dalam bukunya metode khusus pengajaran Pendidikan agama islam mendefinisikan tujuan Pendidikan agama islam adalah membina manusia beragama berarti manusia yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama islam dengan baik dan sempurna, sehingga tercermin mana sikap dan tindakan dalam seluruh kehidupannya, dalam rangka mencapai kebahagiaan dan kejayaan dunia akhirat, yang dapat dibina melalui pengajaran agama yang intensif dan efektif.⁶

Selain itu Pendidikan Agama Islam juga mempunyai fungsi sebagai media untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT. Serta sebagai wahana pengembangan sikap keagamaan dengan mengamalkan apa yang telah didapat dari proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

C. Tujuan Pembelajaran PAI

Secara substansi tujuan Pendidikan Agama Islam adalah mengasuh, membimbing, mendorong, mengusahakan, menumbuh kembangkan manusia taqwa. Taqwa merupakan derajat yang menunjukkan kualitas manusia yang dimana bukan dihadapan sesama manusia saja, tetapi juga dihadapan Allah SWT.⁷

Tujuan Pendidikan Agama Islam selalu berupaya menjadikan manusia agar dapat mencapai keseimbangan pribadi secara menyeluruh. Hal ini dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan tertentu dengan pelatihan aspek kejiwaan, akal, pikiran, perasaan, dan panca indera. Dalam konteks ini, Pendidikan Agama Islam mengemban semua aspek dalam kehidupan manusia, aspek tersebut meliputi aspek spiritual, intelektual, imajinasi, keilmiahan, dan lain sebagainya.⁸

⁶ Zakiyah Darajat, *Metode Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995).

⁷ Nusa Putra, *Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam*, (Bandung : Rosada Karya, 2012).

⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Pendidikan Agama Islam Sekolah Umum dan Luar Biasa*. 4.

Dari beberapa pemaparan diatas dapat kita pahami bahwa tujuan utama Pendidikan Agama Islam adalah sebagai pembentuk karakter terhadap manusia khususnya peserta didik sebagai generasi penerus bangsa, melalui Pendidikan moral dan nilai-nilai yang terkandung dalam muatan materi Pendidikan agama islam yang mencakup dari beberapa aspek yakni dari aspek kognitif, aspek afektif, serta aspek psikomotorik..

D. Komponen Pembelajaran

Pembelajaran dapat dikatakan sebagai suatu sistem karena pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan yaitu membelajarkan peserta didik. Sebagai suatu sistem, tentu saja kegiatan belajar mengajar mengandung komponen. Proses pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai komponen yang satu sama lain saling berinteraksi, dimana pendidik harus memanfaatkan komponen tersebut dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang ingin direncanakan. Berikut ini adalah uraian dari komponen-komponen dalam pembelajaran :

1. Guru dan Siswa

Guru adalah pelaku utama yang merencanakan, mengarahkan, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terdapat dalam upaya memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada peserta didik di sekolah.

2. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran adalah faktor yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Dengan adanya tujuan, maka guru memiliki pedoman dan sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan mengajar. Apabila tujuan pembelajaran sudah jelas dan tegas, maka langkah dan kegiatan pembelajaran akan lebih terarah,

3. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Tanpa adanya materi pembelajaran proses belajar mengajar tidak akan berjalan.

4. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran.

5. Alat Pembelajaran

Alat pembelajaran adalah media yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memperlancar penyelenggaraan pembelajaran agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran.

6. Evaluasi

Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam sistem pembelajaran. Evaluasi bukan saja berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam pembelajaran, akan tetapi juga berfungsi sebagai umpan balik guru atas kinerja yang telah dilakukannya dalam proses pembelajaran.⁹

Dengan adanya evaluasi dalam pembelajaran, guru akan mengetahui sejauh mana siswa dapat memahami materi yang disampaikan. Apabila dalam proses pembelajaran tidak ada evaluasi, maka guru, siswa, orang tua, serta Lembaga tidak akan mengetahui hasil yang diperoleh dari pembelajaran.

E. Pengertian Sistem Kredit Semester

Sistem kredit semester adalah suatu sistem atau pranata dalam konstelasi penyelenggaraan pendidikan dengan mempergunakan kredit untuk mengukur volume beban (tanggung) belajar, volume beban kerja tenaga pengajar, dan volume beban menyelenggarakan program lembaga pendidikan.¹⁰

Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan dasar dan menengah pasal 1 menyebutkan bahwa Sistem Kredit Semester selanjutnya disebut SKS adalah bentuk penyelenggaraan Pendidikan yang peserta didiknya menyepakati jumlah beban belajar yang diikuti dan / atau strategi belajar setiap semester pada satuan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan / kecepatan belajarnya.¹¹ SKS diselenggarakan melalui pengorganisasian pembelajaran bervariasi dan pengelolaan waktu belajar yang fleksibel.

Pengorganisasian pembelajaran bervariasi dilakukan melalui penyediaan unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik. Pengelolaan waktu belajar yang fleksibel dilakukan melalui pengambilan beban belajar untuk unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran oleh peserta didik sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Unit pembelajaran utuh disebut juga dengan Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM).

⁹ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standard Proses Pendidikan*, (Jakarta : Kencana, 2010), 52.

¹⁰ Yahya Ganda, *Petunjuk Praktis Cara Mahasiswa Belajar di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Grasindo, 2004), 74

¹¹ Buku Petunjuk Tekhnis Penyelenggaraan SKS Madrasah Tsanawiyah, 4.

UKBM merupakan satuan pelajaran yang kecil yang disusun secara berurutan dari yang mudah sampai ke yang sukar. Satuan pelajaran tersebut merupakan pebelan penguasaan belajar peserta didik terhadap pengetahuan dan ketrampilan yang disusun menjadi unit-unit kegiatan belajar yang melibatkan satuan waktu belajar. UKBM tersebut memuat Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) serta strategi pembelajaran individual untuk mencapai ketuntasan beban belajar yang telah ditentukan. UKBM di samping sebagai pelabelan penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan dan ketrampilan diharapkan juga memberikan dampak pengiring terbangunya karakter yang dibutuhkan dalam kehidupan abad ke-21 seperti berfikir kritis, bekerjasama, berkomunikasi, dan lain-lain.¹²

Menurut Oemar Hamalik dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Belajar di Perguruan Tinggi* mengatakan “Sistem kredit berarti sistem penghargaan terhadap prestasi siswa dalam bidang atau bidang-bidang pengalaman belajar dalam rangka pemenuhan syarat-syarat program pendidikan yang diikutinya.”¹³

Pendapat lain mengatakan bahwa Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di mana beban studi, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester. Jadi, satuan waktu terkecil sebagai satuan program pendidikan yang dipergunakan sebagai dasar administrasi akademik adalah semester.¹⁴

Dari beberapa pendapat di atas mengenai pengertian Sistem Kredit Semester (SKS) dapat diketahui bahwa Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sebuah sistem yang dijadikan beban dalam penyelenggaraan program yang harus ditempuh oleh siswa atau peserta didik.

F. Landasan Hukum Sistem Kredit Semester

Dalam penyelenggaraan program pendidikan maka harus mempunyai landasan dasar hukum yang melandasinya. Hal ini sangat diperlukan oleh penyelenggara program pendidikan agar dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Adapun landasan hukum penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) adalah:

¹² Buku Pedoman Penyelenggaraan SKS.,

¹³ Oemar Hamalik, *Manajemen Belajar di Perguruan Tinggi* (Bandung: IKAPI, 2003), 35.

¹⁴ Silvia Sukirman, *Tuntunan Belajar di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2004), 14.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 12 Ayat 1 (b) menyatakan bahwa: “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya”. Selanjutnya pada butir (f) menyatakan bahwa: “Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan”.¹⁵
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Pasal 11 mengatur bahwa:
 - a. Ayat (1) Beban belajar untuk SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
 - b. Ayat (2) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada pendidikan formal kategori standar dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester.
 - c. Ayat (3) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada pendidikan formal kategori mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester.
 - d. Ayat (4) Beban belajar minimal dan maksimal bagi satuan pendidikan yang menerapkan sistem sks ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul dari BSNP.¹⁶
3. Beban belajar sebagaimana yang dimaksudkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi yaitu sebagai berikut:
 - a. Satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket atau sistem kredit semester.
 - b. Satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMLB, dan SMK/MAK kategori standar menggunakan sistem paket atau dapat menggunakan sistem kredit semester.

¹⁵ Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta : 2003).

¹⁶ Ibid.,70

- c. Satuan pendidikan SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK kategori mandiri menggunakan sistem kredit semester.¹⁷

G. Prinsip Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester

Penyelenggaraan SKS berorientasi pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang termuat dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan dasar dan menengah. Dalam rangka penguatan program implementasi penyelenggaraan SKS sesuai dengan NSPK tersebut, sebagai penyelenggara SKS maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Setiap peserta didik harus diperlakukan dan dilayani sebagai individu yang unik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan gaya belajar serta kebutuhan ekosistem Pendidikan yang mendukung.
2. Proses belajar dan pembelajaran harus dirancang dan dikembangkan sebagai proses interaktif yang mengorganisasikan pengalaman belajar untuk membangun sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, serta karakter melalui transformasi pengalaman belajar melalui pembelajaran tatap muka, terstruktur, dan mandiri yang bersifat sistematis dan sistemik.
3. Setiap peserta didik harus difasilitasi sedemikian rupa agar mampu mencapai ketuntasan belajar dalam setiap mata pelajaran secara optimal sesuai kecepatan belajarnya.
4. Penilaian hasil belajar peserta didik harus menggunakan penilaian acuan patokan berbasis kompetensi atau tugas otomatis. Artinya penguasaan/capaian belajar setiap peserta didik diukur dari penguasaan kompetensi yang dicapai secara individual.
5. Bahan belajar dan pembelajaran harus menggunakan paket utama yang ditetapkan oleh pihak berwenang atau oleh satuan Pendidikan dan tersedia secara publik di pasaran, yang dapat berbentuk buku teks pelajaran atau modul, yang berbentuk kemasan unit-unit pembelajaran utuh individual yang dapat dipelajari secara mandiri disertai sumber belajar lain yang tercetak atau digital.
6. Program Pendidikan sepenuhnya harus menggunakan struktur kurikulum 2013 beserta semua perangkat pendukung yang relevan dan pengambilan mata pelajaran oleh peserta didik dilakukan secara fleksibel, individual, atau kelompok kecil.

¹⁷ Badan Standar Nasional Pendidikan, *Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah* (Jakarta: BSNP, 2010), 4-5.

7. Guru dan sekolah harus berperan sebagai : fasilitator belajar, pengorganisasi belajar, penopang kajian, pembangun karakter, dan sumber belajar.¹⁸

H. Persyaratan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS)

1. Memiliki akreditasi A dan BAN S/M.
2. Memiliki pedoman penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS).
3. Memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai.
4. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai.
5. Memiliki perpustakaan dengan referensi yang mencukupi.
6. Memiliki sarana literasi.
7. Mendapatkan izin penyelenggaraan SKS dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.¹⁹

I. Mekanisme Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester

Mekanisme penyelenggaraan program SKS di MTsN 2 Kota Kediri secara umum meliputi 3 (tiga) tahap utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi.

1. Persiapan

Pada tahap ini semua komponen terlibat dalam persiapan penyelenggaraan program SKS melaksanakan perannya sesuai dengan jabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk menghasilkan output berupa : dukungan penyelenggaraan SKS dari warga madrasah dan pemangku kepentingan lain, dokumen KTSP, dokumen perangkat pembelajaran dan penilaian, dokumen perangkat layanan akademik dan bimbingan.

2. Pelaksanaan

Pada tahap ini MTsN 2 Kota Kediri menerapkan 7 (tujuh) prinsip penyelenggaraan SKS sebagaimana telah disampaikan yaitu : SKS bukan hanya untuk peserta didik pembelajar cepat saja, transformasi pengalaman belajar melalui pembelajaran tatap muka, terstruktur, dan mandiri, melaksanakan pembelajaran tuntas belajar, penilaian acuan patokan berbasis kompetensi dan kenaikan kelas otomatis, bahan belajar dan pembelajaran berbentuk buku teks pelajaran (BTP) atau

¹⁸ Pedoman Tekhnis Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) MTsN 2 Kota Kediri, 5.

¹⁹ Ibid.,

modul berbentuk unit kegiatan belajar mandiri (UKBM) berbasis KD, sepenuhnya menggunakan struktur kurikulum 2013, dan menyelenggarakan pembelajaran klasikal, kelompok kecil dan individual.

3. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur melalui pengawas madrasah dengan menggunakan instrument Monev. Pengawasan dilakukan mulai dari persiapan sampai dengan kelulusan peserta didik. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh baik sekolah sebagai institusi maupun guru sebagai individu pelaksana SKS.²⁰

J. Pengertian Program dan Evaluasi Program

Ada tiga istilah yang digunakan dan perlu disepakati pemakaiannya, sebelum disampaikan uraian lebih jauh tentang evaluasi program, yaitu “evaluasi” (*evaluation*), “pengukuran” (*measurement*), dan “penilaian” (*assessment*).²¹

Evaluasi berasal dari kata *evaluation* dalam Bahasa Inggris. Kata tersebut diserap kedalam perbendaharaan istilah Bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “*evaluasi*”.²²

Dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

Adapun pengertian dari program adalah “rencana”. Apabila program dikaitkan dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.²³

Menurut Djamari Mardapi ditinjau dari sararnya evaluasi ada yang bersifat mikro dan ada yang bersifat makro. Evaluasi yang bersifat makro subjeknya adalah program Pendidikan, yaitu program yang direncanakan untuk memperbaiki sektor Pendidikan. Sedangkan evaluasi mikro sering diterapkan ditingkat kelas. Oleh karena itu sasaran evaluasi mikro adalah program pembelajaran dikelas dan yang bertanggung

²⁰ Ibid., 21

²¹ Suharsimi Arikunto, *Evaluasi Program Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), 1.

²² Ibid., 2.

²³ S. Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum*, (Bandung : Rosda Karya, 2012), 182.

jawab adalah guru. Guru memiliki tanggung jawab merumuskan dan melaksanakan program pembelajaran di kelas, sedangkan pemimpin sekolah bertanggung jawab untuk mengevaluasi program pembelajaran ditingkat makro termasuk program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh guru.

Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebuah program dapat berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Menurut Cronbach dan Stufflebeam evaluasi program merupakan upaya menyediakan informasi untuk disampaikan pada pengambil keputusan. Dalam bidang Pendidikan Tyler mengemukakan bahwa evaluasi program merupakan proses untuk mengetahui apakah tujuan Pendidikan dapat terealisasi. Dengan demikian evaluasi program Pendidikan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara cermat untuk mengetahui efektifitas masing-masing komponennya. Ada 4 kemungkinan kebijakan dapat dilakukan berdasarkan hasil dalam pelaksanaan sebuah program keputusan yaitu menghentikan program, merevisi program, melanjutkan program, dan menyebarluaskan program. Informasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi sangat berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan dari program, karena dari masukan hasil evaluasi program itulah para pengambil keputusan akan menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan.²⁴

Gardner dalam Stark memberikan definisi evaluasi Pendidikan adalah evaluasi sebagai pertimbangan atau keputusan profesional, evaluasi sebagai pengukuran, dan evaluasi sebagai penilaian dari kesesuaian antara prestasi atau hasil atau tujuan. Departemen Pendidikan Amerika memberikan Batasan bahwa evaluasi mempunyai tiga maksud yaitu menyediakan informasi diagnostik (evaluasi formatif), menilai kemajuan siswa (evaluasi sumatif), dan menilai secara menyeluruh prestasi prestasi dari sesuatu yang sungguh ada (seperti kelas, program, negara).²⁵ Melalui model tertentu secara cermat dan sistematis akan diperoleh data yang handal reliabel sehingga penentuan kebijakan selanjutnya akan tepat dengan catatan data yang digunakan

²⁴ Widoyoko, *Pengembangan Model Evaluasi Pembelajaran*, (Yogyakarta : PPS UNY, 2007),

²⁵ R. Worthen Blaine, *Educational Evaluation : Theory and Practice*, (Belmont : Wadsworth Pub, 1973),

sebagai dasar pertimbangan tersebut adalah data yang tepat baik dari segi isi, cakupan, format maupun tepat dari segi waktu penyampaian.²⁶

Makna evaluasi program itu sendiri mengalami proses pematapan. Definisi yang terkenal untuk evaluasi program dikemukakan oleh Ralph Tyler, yang mengatakan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan Pendidikan sudah dapat terealisasikan.

K. Model Evaluasi CIPP

Penerapan model CIPP dalam evaluasi implementasi kurikulum 2013 dapat membantu dalam menyajikan informasi akuntabilitas dari setiap aspek yang dievaluasi, sehingga membantu pihak-pihak tertentu seperti Lembaga dan instansi Pendidikan dalam mengambil keputusan tentang kurikulum 2013.²⁷

Model ini bertitik tolak pada pandangan bahwa keberhasilan program Pendidikan dipengaruhi oleh berbagai factor, seperti : karakteristik peserta didik dan lingkungan, tujuan program dan peralatan yang digunakan, prosedur dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri. Model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Kekuatan CIPP adalah merupakan alat yang berguna membantu evaluator membangkitkan pertanyaan penting ke evaluasi. Untuk tiap komponen CIPP, evaluator dapat mengidentifikasi sejumlah pertanyaan tentang Pendidikan yang sedang berlangsung, model dan pertanyaan mudah untuk difahami kepada audiens awam. Pendekatan berorientasi manajemen pendukung evaluasi pada tiap komponen dari program Pendidikan seperti operasional, pertumbuhan, dan perubahan-perubahan.²⁸

Evaluasi konteks memfokuskan menilai suatu instansi yang sedang dilaksanakan dalam suatu Lembaga Pendidikan terutama yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh objek evaluasi, maka tugas evaluasi konteks adalah melakukan needs assessment serta memberikan pertimbangan terhadap program yang dievaluasi. Evaluasi input berperan sebagai membantu dalam mengatur keputusan yang berkaitan dengan SDM, alat pendukung dan sarana prasarana, pembiayaan, dan berbagai prosedur/aturan sekiranya dibutuhkan. Evaluasi proses

²⁶ Wakhinuddin, *Evaluasi Program*, (Padang : UNP Press, 2009),

²⁷ Iskandar Tsani, Addin Arsyadana, Sufirmansyah, dan El Shafira, *Evaluasi Model CIPP Pada Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMA Negeri 7 Kota Kediri*, Jurnal Pendidikan Islam Vol.12 No.1 (2021), 41.

²⁸ Iwan Supriyantoko, Akbar Jaya dkk, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Teaching Factory Dengan Model Evaluasi CIPP DI SMK Negeri DKI Jakarta*, Journal of Vocational and Technical Education, Vol 02, No. 02 (2020), 4.

merupakan ditujukan kepada kegiatan atau realita yang berlangsung. Terakhir evaluasi hasil/produk ditujukan untuk menentukan sudah sejauh mana program yang diimplementasikan tersebut telah dapat terpenuhi kebutuhannya.²⁹

Model CIPP ini bukan hanya melihat dari keberhasilan program saja, akan tetapi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu program.³⁰ Sejalan juga yang dikatakan Endrizal bahwa model evaluasi CIPP sangat baik untuk diterapkan dalam memperbaiki dan melihat sejauh mana program yang telah dicapai, apa kendala, dan apa yang harus ditingkatkan dalam program yang sedang dijalankan.³¹

Model CIPP diterapkan dalam rangka mendukung pengembangan organisasi dan membantu pemimpin serta staf organisasi tersebut mendapatkan dan menggunakan masukan secara sistematis supaya lebih mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting atau minimal bekerja sebaik-baiknya dengan SDM yang ada.³²

Model evaluasi ini merupakan model yang paling banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator. Model CIPP ini dikembangkan oleh Stufflebeam, CIPP merupakan singkatan dari huruf awal empat buah kata, yaitu :

1. Context Evaluation

Evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi, dan sampel yang dilayani serta tujuan proyek.

2. Input Evaluation

Evaluasi masukan adalah kemampuan awal siswa dan sekolah dalam menunjang keberlangsungan Pendidikan, seperti evaluasi terhadap peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana, kurikulum, serta input lingkungan.

3. Process Evaluation

Evaluasi proses yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap proses atau kegiatan Pendidikan atau pembelajaran yang sedang berlangsung.

4. Product Evaluation

²⁹ Nurhayani, Yaswinda, Mega Adyna Movitaria, *Model Evaluasi CIPP Dalam Mengevaluasi Program Pendidikan Karakter Sebagai Fungsi Pendidikan*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2, No. 8, (2022), 7.

³⁰ Yaswinda dan Riri Sakti, *Model Evaluasi CIPP Dalam Mengevaluasi Program Visit Home Selama Pandemi Covid 19 di TK Ar Rasyid Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2, No. 8, (2022),

³¹ E. W. Waskito, *Evaluasi Program Pembelajaran Pemeliharaan Kelistrikan Sepeda Motor Menggunakan Model CIPP*, 2021, 26.

³² Daniel L. Stufflebeam dan Anthony J. Shink Field, *Systematic Evaluation : A Self Instructional Guide to Theory and Practice*, (Bostom : Kluwer-Nijhoff Publishing, 1986), 47.

Evaluasi output “bahan yang dihasilkan oleh transformasi” (siswa lulusan). Seberapa jauh tingkat pencapaian/prestasi selama mengikuti program.³³

Keempat kata yang disebutkan diatas singkatan CIPP merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Dengan kata lain, model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah system.

CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Sasaran model evaluasi *Context Input Process Product* (CIPP) memiliki empat komponen dasar dari proses sebuah program kegiatan. Komponen tersebut antara lain evaluasi terhadap konteks, evaluasi terhadap masukan, evaluasi terhadap proses, evaluasi terhadap hasil. Sasaran utama dari evaluasi terhadap konteks (*context*) adalah untuk menelaah status objek secara keseluruhan sehingga dapat memberikan deskripsi mengenai karakteristik lingkungan. Evaluasi terhadap masukan (*input*) dilakukan dengan menelaah dan menilai pendekatan yang relevan yang dapat digunakan. Melalui evaluasi terhadap masukan dapat diketahui dukungan sistem di sekolah terhadap strategi yang dipilih. Evaluasi masukan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menelaah kapabilitas sistem, alternatif strategi program, desain prosedur dimana strategi akan diimplementasikan. Evaluasi proses merupakan evaluasi yang berorientasi pada seberapa jauh kegiatan program terlaksana sesuai dengan rencana, evaluasi proses melibatkan aspek apa kegiatannya, siapa penanggung jawab program, dan kapan kegiatan selesai. Implementasi evaluasi proses ini dapat melalui observasi, perbaikan tingkah laku, studi kasus, kehadiran dan kedisiplinan, serta hambatan-hambatan yang ditemui. Evaluasi produk adalah evaluasi yang bertujuan untuk mengukur, menginterpretasikan, dan menilai capaian program.³⁴

Dibandingkan dengan model formatif, model CIPP lebih lengkap sebab model ini mencakup evaluasi formatif dan sumatif, akan tetapi model CIPP tak lepas dari sejumlah kelemahan. Kelemahan tersebut adalah karena terfokus pada informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan dan staff evaluator boleh jadi tidak responsive terhadap masalah-masalah atau isu-isu yang signifikan, hasil evaluasi ditujukan kepada para pemimpin tingkat atas, sehingga model ini bisa jadi tidak adil dan tidak

³³ George F. Medaus, Michael S. Scriven, dan Daniel L. Stufflebeam, *Evaluation Model : Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation*, (Boston: Kluwer-Nijhof Publishing, 1983), 24

³⁴ Siti Muyana, *Context Input Process Product (CIPP) : Model Evaluasi Layanan Informasi*, Prosiding Seminar Bimbingan dan Konseling, Vol 1. No 1. (2017), 345.

demokratis, dan model CIPP itu kompleks serta memerlukan banyak dana, waktu, dan SDM.³⁵

Evaluasi model CIPP pada dasarnya terkait dengan empat macam penilaian yaitu menilai tujuan dan prioritas dengan membandingkannya dengan kebutuhan, masalah, dan peluang yang tersedia, menilai rencana pelaksanaan dan anggaran yang dibutuhkan dengan membandingkannya dengan tujuan yang ditargetkan, menilai efektivitas program, menilai keberhasilan program dengan membandingkan hasil dan efek sampingnya dengan kebutuhan yang ditargetkan, memeriksa efektivitas biayanya, dan (mungkin) membandingkan biaya dan hasilnya dengan program yang kompetitif, juga dengan menginterpretasikan hasil-hasil yang menghambat pengeluaran upaya sumber daya dan sejauh mana rencana operasional itu baik dan efektif dilaksanakan.³⁶

Menurut Ghazali Darussalam melalui teori model CIPP, evaluasi efektivitas suatu program dimulai dengan sebuah Lembaga yang mengoperasikan sistem control (kursus atau program) kemudian diikuti dengan evaluasi dalam dimensi pertama yaitu evaluasi konteks dengan menetapkan tujuan kurikulum. Berikutnya adalah dimensi kedua, evaluasi masukan memfokuskan pada penggunaan berbagai strategi dan metode pengajaran/pembelajaran sebagai isi dari kursus. Dimensi ketiga adalah evaluasi dari proses yang difokuskan pada penilaian dari implementasi proses dan permasalahan yang ada yang dapat menghindari komponen program dalam bentuk konteks dan masukan. Akhirnya dimensi keempat adalah evaluasi produk yang berfokus pada pencapaian hasil program.³⁷

L. Manfaat Evaluasi Program

Dalam organisasi Pendidikan, evaluasi program dapat disama artikan dengan kegiatan supervise. Secara singkat, supervisi diartikan sebagai upaya mengadakan peninjauan untuk memberikan pembinaan, maka evaluasi program adalah langkah awal dalam supervise, yaitu mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat pula.

Tujuan dan kegunaan evaluasi Pendidikan termasuk perencanaan, pengelolaan, proses, dan tindak lanjut Pendidikan baik yang menyangkut perorangan,

³⁵ Jody L. Fitzpatrick, James R. Sanders, dan Blaine R. Worthen, *Program Education : Alternative Approaches and Practical Guidelines*, (Bostom : Pearson Education, 2004), 5.

³⁶ Petrus Redy Partus Jaya dan Felisitas Ndeot, *Penerapan Model Evaluasi CIPP Dalam Mengevaluasi Program Layanan Paud Holistik Integratif*, PERNIK Jurnal PAUD, Vol 1 No. 1. (2018), 15.

³⁷ Subar Junanto dan Nur Arini Asmaul Kusna, *Evaluasi Program Pembelajaran di PAUD Inklusi Dengan Model Context, Input, Process, and Product (CIPP)*, INKLUSI : Jurnal of Disability Studies, Vol V, No. 2 (2018), 186.

kelompok, maupun kelembagaan. Menurut Thomdike dan Hagen tujuan dan kegunaan evaluasi Pendidikan dapat diartikan kepada keputusan-keputusan yang menyangkut pengajaran, hasil belajar, diagnosis dan usaha perbaikan, penempatan, seleksi, bimbingan dan konseling, kurikulum, dan penilaian kelembagaan. Menurut Suharsimi program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan dan berlangsung dalam proses yang berkesinambungan. Hal ini terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan dalam sekelompok orang. Dalam konsepsi ini, terdapat 3 pengertian penting yang perlu ditekankan dalam menentukan suatu program yakni realisasi atau implementasi kebijakan, terjadi dalam waktu yang relative lama, bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan, terjadi dalam organisasi yang melibatkan orang banyak.³⁸

Menurut Scriven dalam Fernandes bahwa dua fungsi dasar evaluasi yaitu bahwa evaluasi formatif digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan dari sebuah program, sedangkan fungsi dari evaluasi sumatif adalah digunakan untuk tanggung jawab, memilih, dan sertifikasi. Sedangkan standard dari evaluasi ada 4 yaitu utility atau kegunaan, accuracy atau ketepatan, feasibility atau kelayakan, dan propriety atau kebenaran.³⁹

Program adalah rangkaian kegiatan sebagai realisasi dari suatu kebijakan. Apabila suatu program tidak dievaluasi maka tidak dapat diketahui bagaimana dan seberapa jauh kebijakan yang sudah dikeluarkan dapat terlaksana.⁴⁰

Dalam organisasi Pendidikan, evaluasi program dapat disama artikan dengan kegiatan supervise. Secara singkat, supervisi diartikan sebagai upaya mengadakan peninjauan untuk memberikan pembinaan, maka evaluasi program adalah langkah awal dalam supervise, yaitu mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat pula.

Program adalah rangkaian kegiatan sebagai realisasi dari suatu kebijakan. Apabila suatu program tidak dievaluasi maka tidak dapat diketahui bagaimana dan seberapa jauh kebijakan yang sudah dikeluarkan dapat terlaksana.⁴¹

³⁸ Lislle Briggs, *Intructional Design* (New Jersey : Ed. Techn Pub, 1978),

³⁹ Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung : Rosdakarya, 2013),

⁴⁰ Ahmad Sudja'I, *Pengembangan Kurikulum*, (Semarang : AFKI Media, 2013), 95.

⁴¹ Ibid.,

Wujud dari hasil evaluasi adalah sebuah rekomendasi dari evaluator untuk mengambil keputusan. Ada 4 kemungkinan kebijakan dapat dilakukan berdasarkan hasil dalam pelaksanaan sebuah program keputusan, yaitu :

1. Menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya atau tidak dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan.
2. Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan.
3. Melanjutkan program, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang manfaat.
4. Menyebarkan program, karena program tersebut berhasil dengan baik, maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu yang lain.

Informasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi sangat berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan dari program. Karena dari masukan hasil evaluasi program dijadikan untuk menentukan tindak lanjut.